

## Implementasi peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam restrukturisasi organisasi perangkat daerah: Studi pada pemerintah Provinsi Lampung

Fahmutami Damhuri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20218332&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

This thesis discusses the implementation of PP 41 of 2007 in the organizational restructuring of regional policy in Lampung Province. The purpose of this study is to describe the process of organizational restructuring of regional policy and the actors that influence this policy implementation. The design of this study is description with positivism approach.

The organizational restructuring of regional policy in the Government of Lampung Province is stipulated in Regulation No. 9, 10, 11, 12 in 2007, which promote large organization. Organizational restructuring policy is influenced by several factors like: ineffective communication and coordination, inadequate human resources, bureaucratic structure, disposition and restructuring policies that support the socio-political conditions of interest groups.

<hr>

Tesis ini membahas mengenai implementasi PP 41 Tahun 2007 dalam kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi pada Pemerintah Provinsi Lampung. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan positivisme.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung dituangkan pada Perda Nomor 9, 10, 11, 12 Tahun 2007, yang menghasilkan organisasi perangkat daerah yang lebih besar dan gemuk. Kebijakan restrukturisasi organisasi tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yaitu : komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai, struktur birokrasi, disposisi yang menunjang kebijakan restrukturisasi dan kondisi sosial politik yang mempengaruhi kebijakan karena adanya kepentingan kelompok.